

PANCASILA DAN SYARIAT ISLAM: KAJIAN PEMAHAMAN NILAI DAN SIKAP TOLERANSI MASYARAKAT PERDESAAN DI ACEH BARAT

Triyanto¹, Yeni Sri Lestari

Program Studi Sosiologi Universitas Teuku Umar

¹ Email : triyanto@utu.ac.id

Abstrak

Pada masyarakat perdesaan, biasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, saling asih dan asuh, hormat-menghormati dan menghargai. Faktanya, sedikit perbedaan bisa berakibat petaka dalam kasus intoleransi. Penelitian ini untuk mengetahui pandangan dan sikap masyarakat perdesaan di Aceh Barat yang memberlakukan syariat Islam. Selain itu juga untuk mengetahui pemahaman masyarakat perdesaan terhadap posisi Pancasila dan Syariat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila hanya dipahami oleh masyarakat generasi tua yang mengerti bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai sikap toleransi sehingga warga masyarakat juga tidak mendiskriminasi orang dari luar Aceh. Generasi ini juga memahami bahwa menjalankan syariat Islam adalah pelaksanaan Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Mahaesa. Maka tidak ada pertentangan antara syariat Islam dan Pancasila. Sayangnya tidak demikian dengan sebagian generasi muda, yang minim sosialisasi. Celakanya, ada yang memahami bahwa Pancasila dan Syariat Islam bertentangan. Padahal sebenarnya hanya masalah perbedaan persepsi yang masih bisa diselaraskan.

Kata kunci : Pancasila; Revitalisasi Nilai-nilai; NKRI; Toleransi; Syariat Islam

PANCASILA AND ISLAMIC SHARIA: STUDY OF UNDERSTANDING THE VALUE AND ATTITUDE OF COMMUNITY TOLERANCE IN RURAL AREAS IN ACEH BARAT

Abstract

In rural communities, it is common practice to uphold the values of togetherness, mutual care, care, respect, and respect. In fact, a small difference can have catastrophic consequences. This research seeks to find out the views and attitudes of rural communities in West Aceh who impose Islamic law. Also, the understanding of rural communities for the position of Pancasila and Islamic Sharia should be found out. The results showed that Pancasila was understood only by the older generation of people who understood that Pancasila values are an attitude of tolerance so that citizens do not discriminate against people from outside Aceh. This generation also understands that the practice of Islamic law is the implementation of Pancasila, the deity of one. Then there is no conflict between Islamic law and Pancasila. Unfortunately not so with some of the younger generation who lack socialization. Unfortunately, some understand that the Pancasila and the Islamic Sharia are contradictory. Even if it is only about differences in perception that can still be harmonized.

Keywords : Pancasila; values revitalization; NKRI; tolerance; Islamic Sharia

PENDAHULUAN

Perlahan-lahan Pancasila mulai memudar dan menghilang dari Indonesia. Bukan hanya mengenai perilaku, bahkan penelitian tentang Pancasila pun mulai dipandang tidak menarik. Penelitian-penelitian dan artikel-artikel mulai banyak bermunculan tentang khilafah Islamiyah dan syariat Islam. Sebaliknya tulisan-tulisan tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mulai sulit ditemukan. Jika ada, merupakan tulisan dan penelitian yang muncul sebagai arsip lama dan sulit mendapatkan yang baru. Padahal Pancasila merupakan dasar negara yang harus dipegang kuat dan harus ditanamkan sedalam-dalamnya kepada semua warga bangsa ini sepanjang waktu.

Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dianggap hanya sebagian dari nilai-nilai agama yang dianut bagi sebagian orang, karena kenyataannya masih banyak yang menganut kepercayaan tertentu dan memandang kepercayaannya lebih baik daripada Pancasila. Dengan demikian mengikuti ajaran agama atau kepercayaan saja bisa dipandang lebih baik dari mengamalkan Pancasila, dan ada berbagai macam agama dan keyakinan yang ada di Indonesia. Jika pemahaman ini berlangsung terus menerus, maka dapat dipastikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa akan tergores, robek dan akhirnya hilang ditelan sikap ego dan primordial kelompok-kelompok sebagai warga bangsa ini yang seharusnya menjaga dan memegang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Karena Pancasila merupakan pilihan ideologi yang sangat jelas dan diperlukan komitmen bersama untuk mewujudkannya (Wahab & Dede Iswandi, 2018).

Melihat besar dan luasnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ujung barat sampai ke timur dan dari utara sampai paling selatan, kita sadari negeri ini dibangun di atas perbedaan-perbedaan. Perbedaan ini terjadi baik secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal dapat dilihat betapa banyaknya suku bangsa (MPR, 2009) yang mendiami seluruh wilayah Indonesia. Banyaknya suku bangsa menandakan banyaknya bahasa (Anonymous,

2017) dan sistem nilai yang berlaku di masing-masing tempat dimana suku bangsa tersebut berada. Perbedaan nilai memungkinkan sesuatu boleh dilakukan pada suatu tempat, dan pada saat yang sama sesuatu tersebut tidak boleh dilakukan di tempat lain.

Perbedaan horizontal lainnya yang juga penting adalah perbedaan keyakinan atau kepercayaan, dimana di dalamnya termasuk agama-agama yang dianut oleh masyarakat sebagai warga suatu suku bangsa. Secara universal perbedaan agama atau keyakinan tidak selalu memiliki perbedaan ajaran, seperti mengajarkan kebaikan. Semua menganjurkan umatnya untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan hal-hal buruk dan tidak manfaat. Namun, dalam hal-hal tertentu agama juga memberikan perbedaan nilai yang dianut oleh masyarakat, sehingga juga berlaku beberapa hal boleh dilakukan pada suatu masyarakat yang menganut keyakinan mayoritas, dan ditempat lain pada masyarakat yang mayoritas berkeyakinan lain hal tersebut tidak boleh dilakukan.

Perbedaan secara vertikal tampak adanya kesenjangan antara kaum bangsawan dan rakyat jelata, dimana di semua wilayah negeri ini sebelum bersatu menjelma menjadi NKRI terdiri dari kerajaan-kerajaan dimana wilayahnya dikuasai seorang rajadana juga kaum bangsawan lainnya. Hasil penelitian Suhardi yang bekerjasama dengan kementerian dalam negeri, saat ini masih terdapat 186 kerajaan yang masih eksis (Kurniawan, 2012). Hubungan antar manusia sebagai warga dari suatu masyarakat atau warga kerajaan, juga memiliki aturan dan sistem nilai tersendiri. Artinya juga tidak bisa disamakan antara sistem nilai yang satu dengan yang lain.

Akhirnya lengkap, bahwa Indonesia berdiri di atas berbagai macam perbedaan yang semuanya harus diakomodir. Dalam pandangan Nasikun perbedaan secara horizontal dan vertikal tadi merupakan bahaya laten yang harus diwaspadai dan mesti dikelola dengan benar, jika tidak ingin negara ini hancur (Nasikun, 2009).

Negara atau seorang warga negara di Indonesia ini tidak boleh mengunggulkan yang satu dan seolah meniadakan yang lain, karena jikaini terjadi maka pelan dan pasti Indonesia akan hancur. Untuk itu, rumusan Pancasila yang sudah disepakati sebagai konsensus bangsa tetap harus dipegang dan dilaksanakan sebagai panduan hidup bangsa Indonesia. Meskipun dalam pemilihan baik legislatif maupun eksekutif masyarakat bisa memilih yang seagama, atau se suku, dan bisa juga yang memiliki identitas yang sama dengan diri atau kelompoknya (Asmorojati & Risti P, 2018)

Jika ada kelompok ingin menjadikan agama tertentu sebagai ideologi bangsa menggantikan Pancasila atau berlawanan dengan Pancasila harus ditindak dengan tegas. Penting untuk dipahami bersama bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa tidak bertentangan dengan agama manapun, karena “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam sila pertama diyakini mengakomodir seluruh keyakinan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Pancasila juga dinilai menghargai dan mengakomodir perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat. Namun beberapa tahun terakhir ini Pancasila kembali diuji kesaktiannya, banyak pemberitaan media massa baik cetak maupun elektronik memberitakan tentang kasus-kasus intoleransi khususnya tentang perbedaan keyakinan dan cara beribadah.

Masyarakat Aceh Barat merupakan masyarakat muslim dimana pemerintah Aceh telah memberlakukan Syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Keistimewaan yang diberikan pemerintah pusat terhadap Aceh, membuat pemerintahan Aceh menjalankan hukum-hukum sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian masyarakat dalam memandang setiap pelanggaran atau kelakuan akan selalu dikaitkan dengan hukum islam.

Jika pemberlakuan Syariat Islam dan tidak memperkenalkan Pancasila sejak kesepakatan RI-GAM, maka Syariat Islam telah berjalan selama 13 (tiga belas) tahun, dan waktu ini cukup panjang untuk menghilangnya

Pancasila dari kehidupan masyarakat Aceh khususnya yang berusia muda yang tidak peduli dengan ideologi bangsa.

Pancasila telah lama menjadi ideologi bagi bangsa Indonesia, Pancasila juga telah mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia yang berbeda-beda baik perbedaan suku, perbedaan bahasa, agama, adat dan budaya serta perbedaan lainnya. Namun, diantara berbagai daerah yang ada di Indonesia ternyata ada daerah yang memberlakukan syariat Islam seperti di Provinsi Aceh. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji mengenai pemahaman masyarakat perdesaan di Aceh Barat tentang Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan bagaimana pandangan masyarakat di perdesaan tentang posisi Pancasila dalam pelaksanaan syariat islam.

METODE PENELITIAN

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, dimana informan merupakan orang-orang yang dianggap mampu memberikan penjelasan dan mengerti tentang permasalahan yang menjadi kajian peneliti (Sugiyono, 2013).

Sedangkan dalam pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer berdasarkan panduan wawancara yang telah disusun oleh peneliti. Kedalaman data primer dilakukan melalui wawancara dimana pewawancara adalah peneliti merupakan instrumen penting dalam penelitian (Moleong, 2011).

Analisis dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013). Data yang diperoleh dari lapangan dilakukan *reduction*, yang dilakukan sejak pengumpulan data sampai dengan ketika peneliti menyusun laporan. Langkah berikutnya menyajikan data hasil dari reduksi. Mengacu pendapat Sugiyono di atas, penyajian data jika memungkinkan dapat berupa matrik ataupun grafik. Langkah terakhir adalah mengambil kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan selama proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian telah dilakukan dengan melakukan wawancara dengan informan yang ada di wilayah kajian. Sebagaimana ditetapkan bahwa penelitian difokuskan pada masyarakat Gampong Baro dimana memiliki penduduk yang tingkat pendidikan lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat Pantou Reu lainnya. Berdasarkan penjelasan sekdes Gampong Baro, keunggulan masyarakatnya dibandingkan lainnya ini ditunjukkan dengan jumlah sarjana 15 orang, guru 20 orang, dan sedang menempuh perkuliahan sejumlah 10 orang. Data ini merupakan tertinggi dibandingkan dengan desa lainnya. Selain itu, anak-anak di bawah 15 tahun ke bawah yang mengerti Pancasila diprediksikan lebih dari 50%.

Wawancara dalam penelitian dilakukan dengan mengelompokkan informan ke dalam dua kategori yakni generasi tua dan muda. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat yang mengetahui tentang Pancasila hanyalah generasi tua dan itu pun bisa dikatakan sudah banyak yang lupa. Menariknya informan ini masih ingat tentang istilah P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Hal ini seperti dikatakan Muhammad Zaini berikut ini:

Pancasila saya tahu, menurut saya warga masyarakat di sini juga tahu, tapi hanya orang-orang tua saja. Dahulu orang-orang tua yang seumurannya saya ini juga mendapatkan penjelasan Pancasila di sekolah-sekolah dan juga sosialisasi. Namun, anak-anak muda sepertinya kurang paham, apalagi sudah lama tidak terdengar lagi tentang Pancasila itu.

Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh Mahmud, Saifuddin, dan Narjun. Ketiganya juga memahami Pancasila namun sudah lama sekali pemahaman itu didapatnya. Akan tetapi, Pancasila yang sudah lama tidak didengungkan kecuali pada saat upacara bendera kandungan dan maknanya sulit untuk dipahami kembali, mengingat memang sudah lama tidak ada sosialisasi atau sejenisnya oleh pihak-pihak terkait. Penulis mengelompokkan informan ini ke dalam generasi tua. Sebagiannya terdapat orang-orang yang terpelajar atau mengenyam

pendidikan yang baik serta mendapatkan sosialisasi tentang Pancasila atau P4 di sekolah.

Masyarakat terpelajar di wilayah penelitian tersebut juga memahami mengapa Indonesia sebagai negara yang memiliki mayoritas umat Islam ini memilih untuk menggunakan Pancasila sebagai dasar negara dan bukannya Syariat Islam. Menurut Muhaimin, syariat Islam yang direncanakan sebagai sila pertama dihapuskan setelah Bung Hatta menerima keberatan masyarakat Indonesia timur yang kebetulan mayoritas non muslim (Muhaimin, 2013). Namun, bagi masyarakat ini sebagai warga mayoritas tidak perlu khawatir dan harus mampu menjadi pelindung bagi minoritas sebagaimana diajarkan Rasulullah.

Bagi masyarakat atau generasi tua ini yang masih mengenal Pancasila, memandang bahwa Pancasila tidak berseberangan dengan syariat Islam atau sebaliknya yang saat ini berlaku di Aceh. Baginya, pelaksanaan syariat Islam justeru implementasi dari Pancasila yakni sila pertama tentang Ketuhanan Yang Mahaesa. Kebetulan Aceh mayoritas beragama Islam sehingga pelaksanaan sila pertama itu mengacu pada Islam, seperti dikatakan Mahmud mewakili generasi tua.

Tidak bertentangan antara syariat Islam dengan Pancasila, untuk itu negara memberikan izin agar Aceh menjalankan Syariat Islam. Kalau bertentangan dengan Pancasila pastilah pusat tidak akan mengizinkan. Syariat Islam itu justeru pengamalan Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Mahaesa. Orang Aceh kan mayoritas Islam, jadi ya Ketuhanan Yang Mahaesa itu berdasarkan Islam.

Penulis mencoba untuk menghubungkan antara pernyataan informan dengan observasi bahwa di Aceh pada umumnya dan Aceh Barat khususnya masih terdapat warga masyarakat non muslim, namun tidak ada masalah dengan pelaksanaan syariat Islam. Ini membuktikan bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh masih tetap mengakomodir keberadaan masyarakat yang beragama lain. Masyarakat Aceh yang non muslim tetap diberikan kebebasan seperti warga masyarakat di wilayah lainnya. Namun, memiliki kewajiban untuk tetap menghargai dan

menghormati syariat Islam. Kewajiban bagi non muslim untuk menghormati dan menghargai sebagaimana tertuang dalam Qanun. Sebagai contoh, seorang etnik Tionghoa yang non muslim masih dipersilahkan untuk berbusana non islami (tidak berjilbab), namun tidak boleh kemudian menggunakan pakaian sesuka hati seperti pakaian seksi yang ketat dan nampak auratnya (Murti & Triyanto, 2018).

Dalam kajiannya Triyanto menyebutkan bahwa di Aceh Barat yang telah menerapkan syariat Islam ini tidak memperlakukan warga yang non muslim hidup bersama dengan warga masyarakat suku Aceh atau lainnya yang muslim. Salah satu contoh warga non muslim adalah dari etnis Tionghoa. Hal terpenting yang harus dijaga adalah saling menghormati dan menghargai. Sebagian bahkan tertarik untuk masuk Islam dan menjalankan syariat Islam (Triyanto, 2016). Dua paragraf di atas menguatkan betapa generasi tua masyarakat Aceh di perdesaan yang kental dengan agama masih menganggap bahwa syariat Islam merupakan implementasi dari Pancasila.

Sementara bagi sebagian kelompok generasi muda, pemahaman Pancasila sudah memudar, bahkan ada yang tidak mengerti dan tidak paham nilai-nilai yang terkandung didalamnya, ada kecenderungan bahwa generasi muda menilai Pancasila sebagai ideologi yang bertentangan dengan Syariat Islam seperti dikatakan Eva:

Sila pertama Pancasila terkandung pelaksanaan syariat Islam, semestinya tidak saling bertentangan. Namun kenyataannya masih banyak pihak yang menggunakan Pancasila untuk memojokkan Syariat Islam, sehingga seolah-olah melaksanakan Syariat Islam itu tidak benar jika dilakukan di negara ini, karena ideologi negara ini adalah Pancasila.

Pandangan serupa juga dinyatakan oleh Hafis dan Roby, sedikit yang membedakan antara Eva dan Roby adalah sistem pelaksanaan Pancasila dengan syariat Islam itu berbeda, Aceh melaksanakan syariat Islam dan syariat Islamlah yang dilaksanakan, sedangkan Pancasila sila pertama yang ber-Ketuhanan

Yang Mahaesa, seharusnya semua agama dan sistem kepercayaan harusnya ber-Tuhan Yang Esa, namun faktanya di Indonesia ini ada juga agama yang "ketuhanannya tidak esa". Bisa dipelajari ada agama yang menyatakan tuhanya lebih dari 1 (satu), kesimpulannya tuhan mereka tidak ber-ketuhanan yang mahaesa (Tuhan satu).

Jika dilihat dari sisi ini, sepertinya generasi ini memahami juga tentang Pancasila khususnya sila pertama. Namun pengakuannya kelompok ini tidak mengatakan paham tentang Pancasila. Toleransi yang dilakukannya tidak disadari sebagai pelaksanaan Pancasila melainkan disadari sebagai pelaksanaan syariat Islam, dimana Islam juga mengenal ragam perbedaan sebagaimana dalam firman Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi maha mengenal (QS, 49:13).

Dengan ayat di atas menjadi pedoman bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam kondisi berbeda-beda agar saling mengenal dan kemuliaan seseorang itu terletak dari ketaqwaannya. Untuk itu sudah seharusnya antara orang yang satu dengan yang lain saling bekerjasama dalam menempuh kehidupan ini. Sekali lagi generasi muda yang diwakili kelompok ini memandang sikap toleransinya dan juga warga masyarakat bukanlah karena ideologi Pancasila melainkan memang agama Islam menganjurkan dan mengajarkan untuk berbuat baik dan toleransi kepada semua orang.

Keberadaan generasi muda yang juga memandang bahwa Pancasila dan Syariat Islam sangat bertentangan, bagi peneliti ini sangat penting untuk diluruskan agar tidak terjadi hal-hal semacam gerakan anti Pancasila. Apalagi generasi ini juga memandang bahwa toleransi yang ada pada Pancasila merupakan toleransi yang kebablasan sehingga boleh melakukan hal-

hal negatif seperti tertuang dalam puisi “ibu Indonesia”. Bagi masyarakat Aceh ada beberapa hal yang sangat menyinggung mereka yakni, “kerudung”, “azan”, dan “syariat Islam” yang sedang berlaku di Aceh. Untuk itu sangat penting untuk dilakukan sosialisasi bahwa Pancasila juga tidak membenarkan kalimat-kalimat terlontar dengan menyinggung orang lain.

Generasi muda ternyata lebih mengenal syariat Islam dibandingkan dengan Pancasila. Penyebabnya Syariat Islam lebih sering dilakukan sosialisasi oleh para *teungku* sehingga masyarakat benar-benar mengenal syariat Islam di bandingkan Pancasila. Terlebih tidak ada pembahasan atau kasus-kasus yang muncul dalam pembicaraan masyarakat mengenai Pancasila, sehingga sangat wajar bila Pancasila perlahan-lahan tidak dipahami kemudian tidak dikenali.

Berdasarkan data-data hasil penelitian di lapangan maka dapat dibahas berdasarkan teori Struktural Fungsional dimana masyarakat merupakan sebuah struktur sosial (Amri, 2014), Masyarakat di perdesaan Aceh Barat pada dasarnya memiliki struktur yang sama dengan masyarakat yang lainnya. Struktur masyarakat berdasarkan strata sosial untuk membahas kasus ini lebih tepat dengan menunjukkan strata yang berdasarkan pada jabatan, kesalihan/kehormatan, dan pendidikan tinggi yang dimiliki masyarakat. Jabatan ditunjukkan posisi beberapa warga masyarakat yang memimpin atau mengelola *gampoeng* (desa) seperti aparat desa yang dikepalai oleh *keuchik*, kemudian diikuti oleh aparat gampong lainnya seperti sekdes, kaur dan lain sebagainya. Demi mempermudah pembahasan strata berdasarkan jabatan ini disebut dengan komponen pertama.

Sebagai komponen kedua, adalah strata warga masyarakat yang didasarkan atas kesalihan/kehormatan seseorang. Peneliti menempatkan seseorang yang dihormati dan menjadi panutan warga masyarakat adalah sosok *teungku* (ustadz) yang mengajarkan agama di masyarakat. *Teungku* dalam pandangan peneliti merupakan strata yang paling istimewa, mengingat warga masyarakat menganut agama

Islam dan pemerintahan Aceh memberlakukan syariat Islam. Dengan demikian *teungku* merupakan komponen strategis yang mampu mengkomunikasikan antara pemerintah dan masyarakat. Jika level nasional mengenal ulama sebagai panutan, di daerah ini mengenal *teungku* sebagai panutannya.

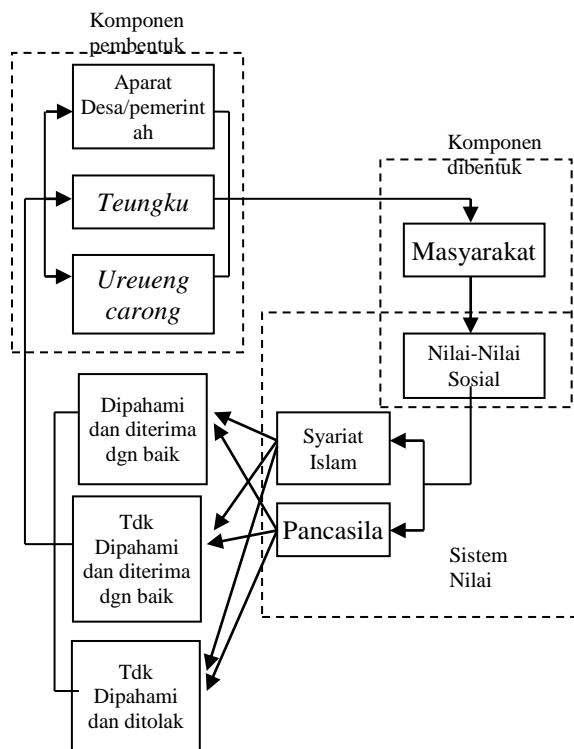
Komponen ketiga, strata masyarakat yang berdasarkan pendidikan tinggi atau kaum intelektual. Komponen ini juga penting karena berpotensi dalam peran melakukan sosialisasi atau pendidikan Pancasila terhadap masyarakat, sekaligus mampu melakukan sosialisasi dalam penguatan Syariat Islam. Namun peneliti memandang bahwa komponen ini berposisi pada strata lebih rendah dibandingkan komponen kedua berkaitan dengan penguatan Syariat Islam, dan lebih kuat dalam penyampaian pengetahuan.

Komponen keempat, masyarakat itu sendiri, yang memiliki pengetahuan dan pemahaman akan Pancasila dan Syariat Islam. Peneliti menempatkan komponen ini sebagai masyarakat dalam posisi obyek yang menerima pengetahuan dan pemahaman yang diberikan oleh komponen lainnya. Baik dan buruknya pemahaman tentang Pancasila dan Syariat Islam tergantung oleh komponen lain yang memberikan pengaruh kepada kelompok ini. Tidak menutup kemungkinan, bahwa masyarakat secara mandiri mampu menggali dan mencari informasi sendiri tentang Pancasila dan Syariat Islam.

Komponen kelima, adalah nilai-nilai aturan yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai ini dibentuk oleh sistem nilai agama Islam yang sudah lama dianut oleh masyarakat. Agama Islam sangat berpengaruh dalam membentuk nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat. Bukan hanya masyarakat dalam komponen keempat, tetapi juga warga masyarakat yang dikelompokkan dalam komponen satu, dua, dan tiga. Namun perlu disadari bahwa awalnya Agama Islam tidak muncul di daerah ini melainkan bahwa di tempat ini Agama Islam tumbuh dan berkembang. Artinya pemahaman masyarakat terhadap agama juga dibentuk oleh komponen

kedua, sehingga jika komponen kedua memahami agama Islam dengan baik, agama Islam yang memiliki toleransi yang tinggi, Islam yang diajarkan Rasulullah yang menghargai dan menghormati umat lain seperti masyarakat di Madinah dalam sejarah Nabi, bahkan nabi memandang kebhinekaan dan kebebasan beragama sebagai *sunnatullah* (Misrawi, 2009), maka demikian juga yang akan terjadi pada masyarakat Aceh di wilayah ini.

Analisis data dilihat secara model sebagai berikut:



Gambar 1. Model pembentukan sistem nilai

Model di atas dapat dijelaskan bahwa komponen aparat desa atau pemerintah, *teungku*, dan kaum intelektual memiliki peran dan fungsi yang penting dalam mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang Pancasila maupun syariat Islam. Masyarakat akan memiliki konsensus tentang nilai sosial seperti apa yang diinginkan bersama dalam menjalani kehidupan ini. Seperti saat ini, antara sistem nilai Pancasila atau sistem nilai syariat Islam. Masyarakat bisa jadi memilih salah satunya atau justru berlaku keduanya jika saling melengkapi dan saling dibutuhkan oleh masyarakat.

Namun karena ketidakpahaman, bisa jadi masyarakat menganggap antara nilai yang terkandung dalam syariat Islam dan Pancasila saling bertentangan dan pengikutnya bisa saling menolak. Bagi generasi tua, memandang antara Pancasila dan syariat Islam saling melengkapi dan sama-sama dibutuhkan, sehingga keduanya dapat berjalan seiring dan saling menguatkan. Sayangnya kaum muda memiliki pemikiran yang berbeda yang bisa jadi diakibatkan oleh karena kurangnya informasi sehingga antara Pancasila dan Syariat Islam dianggapnya saling bertentangan.

Sesungguhnya, pandangan yang dimiliki seluruh warga masyarakat juga diakibatkan oleh peran aparat desa/pemerintah, *teungku*, dan kaum intelektual. Semakin banyak tiga komponen tadi memberikan pemahaman syariat Islam dan mengabaikan Pancasila, maka masyarakat hanya akan memiliki pemahaman syariat Islam tanpa paham Pancasila. Demikian pula yang terjadi jika kondisi sebaliknya.

Penting untuk dipahami juga, bahwa komponen pembentuk akan mengembangkan dan mengajarkan kembali sistem nilai yang sudah terbentuk dari masyarakat. Untuk itu komponen pembentuk harus disadarkan bahwa posisinya sangat penting dalam menata kehidupan masyarakat.

PENUTUP

Pandangan masyarakat tentang nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah sudah kabur. Artinya masyarakat secara umum walaupun masih ingat tentang Pancasila namun mayoritas sudah tidak memahami lagi nilai-nilai Pancasila. Pancasila hanya dipahami sebagai sebuah teks yang biasa dibacakan saat upacara bendera. Bagi generasi tua, menganggap Pancasila posisinya berada dalam Pancasila. Artinya bahwa dalam sila pertama itulah keberadaan syariat Islam. Dengan demikian pula maka syariat Islam tidak bertentangan dengan Pancasila bahkan menjalankan syariat Islam itu dinaungi atau bisa juga dikatakan dilindungi oleh Pancasila. Dapat dipastikan bahwa menjalankan syariat Islam sama dengan menjalankan Pancasila.

UCAPAN TERIMAKASIH

1. Terimakasih kepada kemenristekdikti melalui DRPM dan LPPM UTU yang telah bersedia membiayai penelitian ini.
2. Terimakasih juga kepada Kesbangpol Aceh Barat, dan aparat *gampoeng* dan *tuha peut* yang telah memberikan ijin untuk pelaksanaan sekaligus memberikan data-data terkait penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, M. (2014). "Struktural-fungsionalisme". *Antropologi Indonesia*.
- Anonimous. (2017). *Indonesia*. Retrieved Maret 2, 2019, from www.ethnologue.com: <https://www.ethnologue.com/country/ID>
- Asmorojati, A. W., & Risti P, A. V. (2018). Nationalism Understanding: Citizens' National Consciousness. *Annual Civic Education Conference (ACEC 2018)* (pp. 114-119). Atlantis Press.
- Kurniawan, H. (2012, Desember 26). *186 Kerajaan Indonesia Masih Eksis di Indonesia*. Retrieved Maret 2, 2019, from <https://nasional.sindonews.com>: (<https://nasional.sindonews.com/read/700834/15/186-kerajaan-masih-eksis-di-indonesia-1356496348>)
- Misrawi, Z. (2009). *Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Moleong, L. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- MPR, P. M. (2009). *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI.
- Muhaimin, H. (2013). Indonesia Now. Between Pancasila and Crisis of Democracy in Indonesia. *International Journal for Public Management and Politic Development*, 22-37.
- Murti, F., & Triyanto. (2018). Adaptasi Budaya Etnis Tionghoa di Meulaboh Aceh Barat (Studi: Masyarakat Tionghoa Non Muslim). *Community*, 124.
- Nasikun. (2009). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- QS. (49:13). Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019 <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/49/13>.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Jakarta: Alfabeta.
- Triyanto. (2016). Menjadi Islam Sama Dengan Menjadi Miskin (Studi Adaptasi Muallaf Tionghoa Terhadap Masyarakat Aceh). *Community*, 230-241.
- Wahab, A. A., & Dede Iswandi. (2018). Analysis on The Impact of Citizen's Miss Behavior on Democratic Praxis Based on the Pancasila Values. *Annual Civic Conference (ACEC 2018)* (pp. 168-171). Atlantis Press.